

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah disajikan oleh penulis dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Salah satu jenis pelanggaran hukum yang sering terjadi dalam sektor ketenagalistrikan di Indonesia adalah praktik pencurian listrik. Perbuatan ini, yang dapat dianggap sebagai tindakan melanggar hukum, memiliki potensi merugikan tidak hanya bagi keuangan negara, tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat secara umum. Peningkatan angka pencurian listrik di Indonesia diduga terkait dengan kurangnya efektivitas dalam penegakan hukum, yang pada gilirannya dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk permasalahan sistem hukum dan penegakan hukum di negara ini.
2. Dalam jalannya proses peradilan pidana, surat dakwaan dianggap sebagai salah satu prasyarat formal yang tidak dapat diabaikan. Perlu diperhatikan bahwa surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum harus memenuhi kriteria baik secara formal maupun materiil. Analisis terhadap Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt Utr mengungkapkan adanya kecacatan secara materiil pada surat dakwaan tersebut. Penting untuk dicatat bahwa surat dakwaan tersebut tidak dapat dikatakan memenuhi persyaratan materiil karena kurangnya kecermatan, ketidakjelasan, dan ketidaklengkapannya. Dengan merinci kecacatan-kecacatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penulisan

surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada putusan tersebut patut dipertanyakan. Dalam konteks ini, pandangan penulis menyiratkan bahwa surat dakwaan seharusnya dinyatakan tidak sah atau dibatalkan. Hal ini diutarakan sebagai upaya untuk memastikan bahwa proses

peradilan berjalan dengan adil dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, terutama dalam hal persyaratan formal dan materiil surat dakwaan.

3. Setelah membaca dan menganalisis Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt Utr, menurut hemat penulis, terdapat beberapa hal yang menimbulkan kejanggalan terkait pidana pokok yang dijatuhkan pada terdakwa Teguh alias Tagor. Sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, seharusnya hakim memperhatikan tujuan hukum seperti keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa putusan hakim seharusnya didasarkan pada pedoman yang sesuai dengan tujuan hukum yang sebenarnya, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis akan memberikan saran, yaitu :

1. PT. PLN (Persero) dan Pemerintah diharapkan bekerjasama dalam membuat seminar maupun sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai jenis-jenis tindak pidana ketenagalistrikan, yang

dapat membahayakan keselamatan banyak orang dan menimbulkan kerugian besar baik terhadap oranglain maupun negara.

2. Diperlukan kerjasama antara Pemerintah dan PLN dalam penanggulangan permasalahan pencurian listrik ini. Pemerintah

diharapkan dapat memberikan bantuan finansial berupa subsidi listrik kepada warga yang berpenghasilan rendah, sekaligus meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya membayar tagihan listrik di kalangan masyarakat. Sementara itu, PLN perlu intensif dalam melakukan pengawasan dan menegakkan hukum terhadap individu yang terlibat dalam kegiatan pencurian listrik. Melalui pemberian subsidi listrik kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu, diharapkan dapat mengurangi insentif untuk melakukan tindakan pencurian listrik guna memenuhi kebutuhan energi mereka.

3. Dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim seharusnya mempertimbangkan berbagai aspek tujuan hukum, seperti keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan pertanggungjawaban pidana, ketika menetapkan putusan. Adalah krusial bagi hakim untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada pedoman yang sesuai dengan tujuan hukum yang sebenarnya, dengan tujuan menyelesaikan permasalahan yang sedang dipertimbangkan. Selain itu, putusan yang dihasilkan oleh hakim sepatutnya memberikan manfaat baik bagi pihak yang terlibat dalam perselisihan maupun masyarakat pada umumnya. Dalam konteks ini, penting bagi hakim untuk mengarahkan

keputusannya agar tidak hanya memberikan keadilan segera, tetapi juga menciptakan dampak positif dalam masyarakat. Salah satu pertimbangan utama adalah bahwa keputusan tersebut dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kejadian serupa di masa depan. Dengan demikian, penulis menyarankan agar hakim memperhitungkan faktor-faktor ini dengan serius dalam proses pengambilan keputusan mereka, guna mendukung pencapaian tujuan hukum yang lebih luas dan keadilan yang berkelanjutan.

